

PERAN GEOPOLITIK DALAM MEMPERKUAT WAWASAN NUSANTARA DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

**Jasmine Nurlatifah Salamah¹⁾, Aulia Nazwa Saskia²⁾, Shabria Wafa Haniya³⁾, Zaenul
Slam⁴⁾**

^{1),2),3),4)}**Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**

Email : jasmine.nurlatifah25@mhs.uinjkt.ac.id¹⁾, aulia.nazwa25@mhs.uinjkt.ac.id²⁾,
shabria.wafa25@mhs.uinjkt.ac.id³⁾, [zaenul slam@uinjkt.ac.id](mailto:zaenul_slam@uinjkt.ac.id)⁴⁾

Abstract: *Indonesia as an archipelagic country has a strategic geographical position, requiring geopolitical policies that are able to maintain territorial unity and national interests. This study aims to analyze the relationship between geopolitics, the Archipelagic Insight (Wawasan Nusantara), and regional autonomy in strengthening national integration in Indonesia. The method used in this study is a literature review by examining various journals, laws, and other relevant academic sources. The results show that geopolitics plays a role in determining the direction of national interests, Wawasan Nusantara functions as a guideline for maintaining national unity, while regional autonomy serves as an instrument for equitable development and regional potential management. However, the implementation of regional autonomy also faces challenges such as development inequality, conflicts of authority between central and local governments, regional egoism, and the influence of globalization. Therefore, synergy between the central and regional governments, improvement of human resource quality, and strengthening national values are needed to ensure that regional autonomy remains aligned with the spirit of Wawasan Nusantara and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Geopolitics, Wawasan Nusantara, Regional Autonomy, National Integration, Globalization.*

Abstrak: Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis yang strategis sehingga memerlukan kebijakan geopolitik yang mampu menjaga persatuan wilayah dan kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara geopolitik, Wawasan Nusantara, dan otonomi daerah dalam memperkuat integrasi nasional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa geopolitik berperan dalam menentukan arah kepentingan nasional, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga persatuan bangsa, sedangkan otonomi daerah menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah. Namun, implementasi otonomi daerah juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan pembangunan, konflik kewenangan pusat dan daerah, ego kedaerahan, serta pengaruh globalisasi. Oleh karena itu,

diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan nilai kebangsaan agar otonomi daerah tetap sejalan dengan semangat Wawasan Nusantara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Geopolitik, Wawasan Nusantara, Otonomi Daerah, Integrasi Nasional, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan ¹.

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup bangsa yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi keputusan politik negara tersebut. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi (Dwi Sulisworo, 2012) sebagaimana dikutip dari jurnal ².

¹ Anggi Akmaliza et al., “Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran GEOPOLITIK INDONESIA Program Studi Pancasila , Fakultas Pertanian , Universitas Asahan Anggi Akmaliza et Al . Geopolitik Indonesia.” 1, no. 2 (2022): 92–109.

² Cendikiawan et al., “WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI PILAR GEOPOLITIK INDONESIA : STRATEGI INTEGRASI NASIONAL DI ERA DINAMIKA GLOBAL THE ARCHIPELAGO INSIGHT AS A PILLAR OF INDONESIA ’ S GEOPOLITICS : A NATIONAL INTEGRATION STRATEGY IN THE ERA OF GLOBAL DYNAMICS,” no. November (2025): 8166–74.

Sedangkan istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan pidato tersebut, berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Ir. Soekarno dalam pidatonya menyebutkan bahwa syarat bangsa menurut Renan Ernest adalah “Le desir d’etre ensemble dan Character-gemeinschaft” yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Dengan kata lain syarat bangsa adalah kehendak untuk Bersatu. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara³.

Geopolitik sangat penting diterapkan di Indonesia karena negara ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara (Santoso, Marsella, Permana, & Syifa, 2023). Indonesia Adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di persimpangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini membuat Indonesia menjadi titik penting dalam jalur perdagangan internasional, serta memiliki pengaruh besar dalam kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, batu bara, dan berbagai komoditas lainnya, yang menjadi daya tarik besar bagi negara-negara asing. Selain itu, geopolitik juga sangat penting di Indonesia karena faktor keamanan dan stabilitas. Negara ini memiliki banyak etnis, bahasa, dan budaya yang beragam, sehingga menjaga persatuan dan kestabilan dalam negeri sangat penting. 10 Indonesia perlu melakukan pengelolaan untuk geopolitik sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat dengan mengutamakan stabilitas dalam negeri dan kerjasama regional yang kuat. Pemerintah harus menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya, termasuk pengawasan perbatasan, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi⁴.

Selain itu, Indonesia harus terus mempromosikan diplomasi yang aktif dan konstruktif, berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Kerjasama regional, terutama melalui ASEAN, juga harus

³ Cendikiawan et al.

⁴ Dhilla Adhika Prawesti et al., “Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Perspektif , Kontribusi , Dan Dukungan Mahasiswa Dalam Wawasan Nusantara , Geopolitik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)” 02, no. 06 (2023): 9–17.

dipertahankan dan diperkuat untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Selain itu, dalam aspek ekonomi, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, investasi dalam sumber daya manusia, dan pembentukan iklim usaha yang kondusif adalah kunci. Dengan cara ini, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya ⁵.

Sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya dibutuhkan untuk menerapkan pemikiran geopolitik dan wawasan nusantara yaitu seharusnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik dan wawasan Nusantara melalui pendidikan dan informasi yang mudah diakses (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023). Ini mencakup pemahaman akan peran strategis Indonesia di kawasan dan dunia, serta pentingnya menjaga stabilitas regional. Selain itu, kolaborasi dan keterlibatan aktif dalam isu-isu luar negeri dan kerjasama regional sangat penting. Terakhir, kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup harus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah Nusantara. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat lebih baik menghadapi tantangan geopolitik dan menjaga kepentingan nasional ⁶.

TINJAUAN TEORITIS

1. Konsep Geopolitik dan Perkembangannya

Konsep geopolitik adalah suatu pendekatan yang menggabungkan aspek geopolitik dan pertahanan dalam merumuskan kebijakan keamanan suatu negara. Konsep ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor geografis, politik, ekonomi, dan militer untuk memahami dinamika kekuatan dan ancaman di wilayah tertentu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, negara dapat merencanakan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Penggunaan konsep geopolitik pertahanan juga memungkinkan negara untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang yang mungkin muncul dari keadaan geografis dan politik wilayahnya. Dengan demikian, konsep ini membantu negara dalam mengambil Keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan keamanan yang ada (Aris, Edhita, 2023:4) sebagai mana di kutip dalam jurnal ⁷.

⁵ Prawesti et al.

⁶ Prawesti et al.

⁷ Marzuki Manurung, Syaidil Khudri, and Halimatus Sa, "Wawasan Nusantara / Geopolitik Dan Geostrategi" 9 (2025): 21252–56.

Selain itu juga, konsep geopolitik ini juga dapat membantu negara dalam merencanakan strategi pertahanan yang efektif. Misalnya, dengan menganalisis faktor-faktor geografis seperti topografi dan geografis, negara dapat menentukan posisi yang optimal untuk membangun pangkalan militer dan system pertahanan udara. Hal ini akan memungkinkan negara untuk memiliki control yang lebih baik atas wilayahnya dan mengurangi risiko serangan dari pihak musuh. Geopolitik juga membantu negara dalam merencanakan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan keamanan nasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik, seperti hubungan dengan negara-negara tetangga, negara dapat menjalin aliansi dan Kerjasama yang strategis untuk menghadapi ancaman Bersama. Selain itu, konsep geopolitik juga dapat membantu negara dalam mengidentifikasi ancaman yang potensial dan mengambil Langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dengan demikian, geopolitik juga dapat kerja yang penting bagi negara dalam melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Melalui analisis faktor-faktor geopolitik, negara dapat mengenali ancaman yang mungkin muncul dari negara-negaratetangga dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga kestabilan dan keamanan nasional ⁸.

Memahami geopolitik ini sangat penting untuk memahami dinamika kompleks keamanan internasional. Dengan menganalisis bagaimana faktor geografis bersinggung dengan strategi militer, pembuat kebijakan dapat membuat Keputusan yang tepat untuk melindungi kepentingan negara mereka. Bidang kajian ini tidak hanya mengkaji aspek fisik bentang alam tetapi juga menggali dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk kebijakan pertahanan. Selain itu, geopolitik mempertimbangkan konteks sejarah dan dinamika kekuatan antar negara, memberikan kerangka komprehensif untuk menganalisis masalah keamanan. Dalam memahami hubungan antara geografi dan strategi militer, pertama-tama kita harus memeriksa aspek fisik lanskap. Topografi, iklim, dan sumber daya alam suatu wilayah dapat sangat mempengaruhi operasi dan taktik militer. Misalnya, medan pegunungan dapat memberikan penghalang alami dan keuntungan pertahanan, sedangkan dataran datar dapat menawarkan peluang untuk pergerakan cepat dan kemampuan bermanuver. Selain itu, faktor-faktor seperti kedekatan dengan garis Pantai, Sungai, atau titik rawan strategis dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pertahanan. Memahami aspek fisik lanskap sangat penting untuk mengembangkan strategis pertahanan yang efektif. Topografi suatu wilayah dapat menentukan kemudahan atau kesulitan pergerakan baik untuk kekuatan

⁸ Manurung, Khudri, and Sa.

ofensif maupun defensif. Medan pegunungan, misalnya, dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pasukan penyerbu, karena memberikan penghalang alami dan sulit diatasi (Aris,Edhita,2023:7) sebagaimana di kutip dalam jurnal ⁹

2. Wawasan Nusantara sebagai Doktrin Geopolitik Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pemikiran geopolitik diwujudkan melalui konsep Wawasan Nusantara sebagai doktrin geopolitik nasional yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan ideologi bangsa. Wawasan Nusantara merupakan konsep yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia sebagai dasar untuk menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa. Secara historis, istilah "Wawasan Nusantara" pertama kali digunakan oleh Menteri Pertahanan, M. Nasir, pada tahun 1967. Konsep ini bertujuan untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, yang memiliki tantangan besar dalam menjaga kesatuan dan persatuan wilayahnya. Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga menghadapi risiko disintegrasi akibat keragaman geografis dan budaya (Belen Keban & Soi Leton, 2023) sebagaimana dikutip dalam jurnal ¹⁰.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang pengembangan Wawasan Nusantara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan terbesar di dunia, dengan posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera. Kondisi ini membawa keuntungan sekaligus kerawanan, karena bangsa Indonesia harus mampu mengelola keanekaragaman sumber daya alam dan budaya di tengah tekanan dan ancaman dari kepentingan bangsa lain. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara dikembangkan sebagai pandangan geopolitik yang mengedepankan persatuan wilayah dan bangsa, serta sebagai strategi nasional untuk mempertahankan kelestarian dan mencapai tujuan nasional ¹¹.

Wawasan Nusantara juga mengandung makna yang dalam tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep ini mengajarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya, namun keberagaman tersebut harus dikelola dengan bijak agar tidak menjadi sumber perpecahan. Dalam perspektif ini, Wawasan Nusantara menekankan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta pengakuan terhadap hak-hak semua kelompok yang ada di Indonesia. Sebagai dasar dari kebijakan negara, Wawasan Nusantara

⁹ Manurung, Khudri, and Sa.

¹⁰ Ainnur R Tamu, Pembangunan Ekonomi, and R Tamu, "Tinjauan Yuridis Wawasan Nusantara Sebagai Paradigma Dalam Pembentukan Kebijakan Pertahanan , Pembangunan Ekonomi , Dan Pelestarian Sosial Budaya Di Indonesia" 06, no. 03 (2025): 672–83.

¹¹ Tamu, Ekonomi, and Tamu.

juga menjadi landasan bagi pembentukan ideologi negara dan pembinaan karakter bangsa. Melalui penerapan Wawasan Nusantara, diharapkan dapat tercipta rasa kebersamaan yang kuat antara sesama warga negara, meskipun berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya. Konsep ini menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa (Megawanti et al., 2022) sebagaimana dikutip dalam jurnal ¹².

Pentingnya Wawasan Nusantara juga dapat dilihat dalam konteks geopolitik global, di mana Indonesia harus mempertahankan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan antara dua samudra besar, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang penting, Indonesia perlu menjaga stabilitas wilayahnya agar dapat memainkan peran yang lebih besar di tingkat internasional. Selain itu, Wawasan Nusantara juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang daerah atau kelompok tertentu. Dengan demikian, konsep ini menjadi dasar dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Terakhir, dalam konteks internasional, Wawasan Nusantara jugamengandung dimensi hubungan luar negeri Indonesia. Konsep ini mengajarkan pentingnya posisi Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan dunia, serta peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Dalam hal ini, Wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, serta memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, budaya, dan diplomasi (Saputri & Najicha, 2023) sebagaimana dikutip dalam jurnal ¹³.

Wawasan Nusantara memiliki relevansi yang sangat besar dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu, konsep Wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pertahanan yang komprehensif, melibatkan seluruh aspek kehidupan bangsa, mulai dari militer hingga sektor sipil. Dalam hal ini, penerapan Wawasan Nusantara mengedepankan prinsip kewaspadaan

¹² Tamu, Ekonomi, and Tamu.

¹³ Tamu, Ekonomi, and Tamu.

terhadap ancaman yang dapat merusak integritas wilayah Indonesia (Muntahar et al., 2021) sebagaimana dikutip dalam jurnal ¹⁴.

Pertahanan dan keamanan negara Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya penguatan pertahanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang rentan terhadap ancaman eksternal. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan potensi sumber daya alam dan maritim yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan negara. Selain itu, Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya kesatuan dan Kerjasama antar berbagai elemen bangsa dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara menekankan pentingnya soliditas antar Lembaga pemerintahan, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional. Strategi pertahanan yang diterapkan juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman yang terus berubah (Pratama et al., 2023) sebagaimana dikutip dalam jurnal ¹⁵.

3. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Keterkaitan antara Wawasan Nusantara dan pengelolaan pemerintahan juga terlihat dalam penerapan teori desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau di bawah dalam menentukan sejumlah persoalan yang langsung mereka perhatikan. Dalam pandangan Rondinelli, sebuah pemerintahan yang sersentralisasi tetapi pejabatnya dipilih secara teratur jelas lebih demokratis daripada sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi terkontrol secara ketat oleh sebuah partai politik yang otoriter. Pandangan seperti ini tidak lepas dari pokok perhatian Rondinelli yang lebih terfokus pada desentralisasi administratif daripada desentralisasi politik ¹⁶.

¹⁴ Tamu, Ekonomi, and Tamu.

¹⁵ Tamu, Ekonomi, and Tamu.

¹⁶ M Fernanda, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik" 7, no. 3 (2023): 2409–18, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5423/http>.

Pemberian kewenangan kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil, merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang disekitar lingkungannya. Demikian pula Pemerintah Daerah memahami betul kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber daya dan sumber biaya dalam rangka mendukung fungsi dan tugas pemerintahan. Dukungan terhadap Pemerintah Daerah akan menjadi besar dan kuat, karena rekuitmen politik lokal memberikan peluang kepada masyarakat mempunyai pemerintahan yang memiliki ikatan psikologis dan emosional dengan mereka (Kacung Marijan, 2006) dikutip dalam jurnal ¹⁷.

Sistem desentralisasi mensahkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan sentralisasi hanya memperkenankan satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan (trust) dari pemerintahan pusat kepada daerah. Hal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang dicanangkan melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan demokrasi, baik di tingkat lokal ataupun nasional ¹⁸.

Dalam hal ini, otonomi daerah menjadi inti dari sistem desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggelan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan monos yang berarti undang- undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri). Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding yakni menjalankan rumah tangga sendiri (M. Laica Marzuki, 2006) sebagaimana dikutip dalam jurnal ¹⁹.

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah memiliki peran penting dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama:

¹⁷ Fernanda, Frinaldi, and Magriasti.

¹⁸ Fernanda, Frinaldi, and Magriasti.

¹⁹ Fernanda, Frinaldi, and Magriasti.

- a) Penguatan Ketahanan Nasional Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional. Dengan desentralisasi, daerah dapat mengelola sumber daya dan potensi lokal dengan lebih efektif, yang membantu mengurangi ketergantungan pada pusat dan meningkatkan stabilitas nasional.
- b) Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam mereka secara lebih efisien dan bertanggung jawab. Hal ini penting dalam konteks geopolitik, karena pengelolaan yang baik dapat mengurangi konflik dan ketegangan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya.
- c) Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah Dengan adanya otonomi, daerah dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Ini memungkinkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Ekonomi yang kuat di seluruh daerah memperkuat posisi geostrategis Indonesia sebagai negara yang stabil dan berkembang.
- d) Pengelolaan Keamanan Lokal Otonomi daerah juga melibatkan pengelolaan aspek keamanan lokal. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka, yang penting dalam konteks geostrategis untuk mencegah konflik lokal yang dapat bereskalasi menjadi ancaman nasional.
- e) Diplomasi dan Kerjasama Antar Daerah Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk menjalin kerjasama langsung dengan daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini dapat menciptakan jaringan diplomasi dan kerjasama yang kuat, memperkuat posisi geopolitik Indonesia di tingkat regional dan global.
- f) Adaptasi Terhadap Tantangan Global Daerah dengan otonomi yang kuat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan global, seperti perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Kemampuan untuk merespons secara lokal terhadap tantangan ini memperkuat posisi Indonesia secara keseluruhan di arena internasional.
- g) Keberagaman dan Keutuhan Negara Otonomi daerah memungkinkan pengakuan dan pengelolaan keberagaman budaya, bahasa, dan etnis di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan negara dengan cara yang inklusif dan menghargai perbedaan, yang merupakan aspek penting dalam strategi geopolitik Indonesia.

Peranan otonomi daerah dalam geopolitik dan geostrategi Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari strategi nasional yang berfokus pada pengembangan wilayah dan keamanan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintahan daerah untuk lebih aktif dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah. Dalam konteks geopolitik, otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan identitas wilayah, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman dan meningkatkan keamanan wilayah. Dalam konteks geostrategi, otonomi daerah dapat membantu meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan sumber daya alam dan meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan wilayah. Dengan demikian, otonomi daerah dapat menjadi bagian penting dalam strategi geopolitik dan geostrategi Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan kemampuan wilayah²⁰.

Secara keseluruhan, otonomi daerah memainkan peran kunci dalam memperkuat posisi geopolitik dan geostrategi Indonesia. Dengan memberdayakan daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, menjaga keamanan lokal, dan berpartisipasi dalam diplomasi dan kerjasama, Indonesia dapat menciptakan stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan, serta memperkuat posisinya di kancah internasional²¹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur. Metode kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan tentang geopolitik, Wawasan Nusantara, dan otonomi daerah.

Penggunaan metode kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian teoritis dan analisis konsep. Data yang dikumpulkan tidak diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara, melainkan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang mendukung pembahasan. Melalui metode ini, penulis dapat memahami hubungan antara geopolitik sebagai cara pandang negara terhadap wilayah, Wawasan Nusantara sebagai landasan persatuan bangsa, serta otonomi daerah sebagai kebijakan pemerintahan dalam

²⁰ Ihda Attika Asrina et al., "Geopolitik Dan Gostrategis Indonesia : Peranan Otonomi Daerah" 8 (2024): 24266–76.

²¹ Asrina et al.

mengelola keberagaman wilayah Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan isi sumber bacaan, menghubungkan teori dengan permasalahan yang dibahas, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian literatur. Dengan demikian, metode kepustakaan membantu penelitian ini dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran geopolitik dalam memperkuat Wawasan Nusantara dan kebijakan otonomi daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Geopolitik dalam Memperkuat Wawasan Nusantara

1. Peran Geopolitik dalam Menjaga Persatuan Wilayah

Geopolitik merupakan cara pandang suatu bangsa dalam melihat hubungan antara wilayah, kekuasaan, dan kepentingan nasional. Dalam konteks Indonesia, geopolitik sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah luas, terdiri atas banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya. Geopolitik Indonesia diwujudkan dalam konsep Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam memahami wilayahnya sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun pertahanan keamanan (Akmaliza et al., 2022). Oleh karena itu, geopolitik berperan sebagai dasar untuk menjaga persatuan wilayah Indonesia agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan geografis maupun sosial.

Peran geopolitik dalam menjaga persatuan wilayah terlihat dari pandangan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pulau-pulau di Indonesia tidak boleh dipandang sebagai wilayah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi landasan penting dalam memperkuat persatuan karena menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik yang harus dijaga bersama (Manurung et al., 2025). Dengan cara pandang ini, setiap daerah memiliki kedudukan yang sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, geopolitik juga membantu negara dalam mengelola wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Letak Indonesia yang strategis di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memberikan keuntungan, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan, konflik

perbatasan, dan pengaruh global. Dalam hal ini, geopolitik berfungsi sebagai dasar untuk memperkuat kedaulatan negara serta menjaga stabilitas wilayah Indonesia (Akmaliza et al., 2022). Karena itu, geopolitik menjadi dasar penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat rasa persatuan seluruh masyarakat Indonesia.

2. Wawasan Nusantara sebagai Instrumen Integrasi Nasional

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini lahir dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pilar geopolitik Indonesia karena mampu menyatukan perbedaan wilayah dan masyarakat dalam satu identitas nasional (Cendikiawan et al., 2025).

Sebagai instrumen integrasi nasional, Wawasan Nusantara berfungsi menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Keberagaman tidak dipandang sebagai pemisah, tetapi sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dalam kehidupan berbangsa, Wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk membangun kesadaran bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan negara (Prawesti et al., 2023). Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi alat pemersatu bangsa di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam bidang politik, Wawasan Nusantara mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang adil bagi seluruh daerah. Dalam bidang ekonomi, Wawasan Nusantara menekankan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembangunan hanya terpusat pada daerah tertentu, maka ketimpangan antarwilayah dapat melemahkan integrasi nasional. Oleh sebab itu, Wawasan Nusantara menjadi dasar penting dalam memperkuat persatuan, pemerataan pembangunan, dan keutuhan bangsa Indonesia (Cendikiawan et al., 2025).

B. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Geopolitik

1. Tujuan dan Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat

pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian daerah. Dalam perspektif geopolitik, otonomi daerah menjadi penting karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, serta kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda (Fernanda et al., 2023).

Implementasi otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Otonomi daerah juga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif karena keputusan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat (Asrina et al., 2024).

Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul adalah korupsi di daerah, lemahnya kemampuan aparatur pemerintah, ketimpangan anggaran, dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang baik (Fernanda et al., 2023). Oleh karena itu, otonomi daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tujuannya benar-benar tercapai.

2. Otonomi Daerah sebagai Strategi Pengelolaan Wilayah

Dalam perspektif geopolitik, otonomi daerah bukan hanya pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga strategi untuk mengelola wilayah Indonesia yang luas dan beragam. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, seperti daerah pesisir dengan potensi kelautan, daerah pegunungan dengan potensi pertanian dan pariwisata, serta daerah perkotaan dengan potensi industri dan jasa. Melalui otonomi daerah, setiap wilayah dapat mengembangkan potensi lokalnya sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakatnya (Asrina et al., 2024).

Otonomi daerah juga membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat. Dalam konteks geopolitik, otonomi daerah dapat menjadi strategi penting untuk mempercepat pembangunan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar daerah (Fernanda et al., 2023).

Dengan demikian, otonomi daerah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat pemerataan pembangunan nasional.

Selain itu, otonomi daerah juga berperan dalam menjaga stabilitas nasional. Daerah yang diberi ruang untuk mengatur wilayahnya sendiri akan merasa lebih diperhatikan dan dilibatkan dalam pembangunan nasional. Namun, otonomi daerah tetap harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak menimbulkan pemisahan kepentingan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi strategi pengelolaan wilayah yang tetap menjaga persatuan Indonesia, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung pembangunan yang merata (Tamu et al., 2025).

C. Analisis Keterkaitan

1. Sinergi antara Geopolitik, Wawasan Nusantara, dan Otonomi Daerah

Geopolitik Indonesia menempatkan posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi ini menuntut adanya strategi untuk menjaga keutuhan wilayah nasional. Dalam konteks tersebut, Wawasan Nusantara berperan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Konsep ini memastikan bahwa keberagaman daerah tetap berada dalam satu kesatuan nasional. Sementara itu, otonomi daerah menjadi instrumen pelaksanaan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan sendiri sesuai potensi lokal. Jika dijalankan dengan baik, otonomi daerah dapat memperkuat geopolitik nasional karena setiap daerah mampu berkembang tanpa meninggalkan identitas nasional²².

Artinya:

Geopolitik → menentukan arah kepentingan nasional

Wawasan Nusantara → menjaga persatuan bangsa

Otonomi Daerah → menjadi alat pemerataan pembangunan daerah

Ketiganya saling mendukung dalam menjaga stabilitas NKRI.

²² Asrina et al.

2. Dampak Positif dan Potensi Disintegrasi

Dampak positif otonomi daerah ²³ :

- 1) Mempercepat pembangunan daerah
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal
- 3) Kebijakan lebih sesuai kebutuhan daerah
- 4) Menggali potensi ekonomi lokal
- 5) Mengurangi ketimpangan pusat dan daerah

Namun, terdapat potensi disintegrasi, seperti:

- 1) Munculnya ego kedaerahan
- 2) Konflik kewenangan antara pusat dan daerah
- 3) Tuntutan pemekaran wilayah berlebihan
- 4) Ketimpangan pembangunan antar daerah
- 5) Korupsi di tingkat pemerintah daerah

Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat melemahkan semangat Wawasan Nusantara karena kepentingan daerah bisa lebih dominan dibanding kepentingan nasional.

3. Analisis Kebijakan Berdasarkan Literatur

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan luas, tetapi tetap berada dalam kerangka NKRI. Menurut penelitian Asrina dkk. (2024), kebijakan otonomi daerah harus tetap diarahkan untuk:

- 1) Menjaga pemerataan pembangunan
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memperkuat daya saing daerah
- 4) Tetap menjaga integrasi nasional

Literatur juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap perlu melakukan pengawasan agar desentralisasi tidak menimbulkan ketimpangan ataupun konflik politik daerah.

²³ Program Studi et al., "THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION TOWARDS THE PRINCIPLES" 6, no. 8 (2025): 1–16.

D. Tantangan dan Strategi Penguatan

1. Tantangan Implementasi di Era Globalisasi

Di era globalisasi, daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti:

- 1) Persaingan ekonomi global
- 2) Pengaruh budaya asing
- 3) Perkembangan teknologi yang cepat
- 4) Ketimpangan kualitas SDM antar daerah
- 5) Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat
- 6) Ancaman separatisme dan konflik identitas lokal

Globalisasi menuntut daerah untuk lebih kompetitif, tetapi tetap menjaga kepentingan nasional agar tidak kehilangan kedaulatan.

2. Strategi Optimalisasi Otonomi Daerah untuk Memperkuat Wawasan Nusantara

Beberapa strategi yang dapat dilakukan:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM daerah melalui pendidikan, pelatihan birokrasi, dan penguasaan teknologi.
- 2) Memperkuat pengawasan pemerintah pusat agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
- 3) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- 4) Memperkuat pendidikan nilai kebangsaan agar masyarakat tetap memiliki semangat persatuan.
- 5) Pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan agar daerah mandiri secara ekonomi.
- 6) Kolaborasi pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan global bersama.

Dengan strategi tersebut, otonomi daerah tidak hanya memberikan kebebasan kepada daerah, tetapi juga memperkuat persatuan nasional sesuai semangat Wawasan Nusantara

E. Studi Kasus

RUU Daerah Kepulauan menegaskan peran geopolitik penting bagi Wawasan Nusantara dan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Saya melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Posisi geostrategis Indonesia sangat penting untuk jalur perdagangan dan keamanan global. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan wilayah yang meliputi daratan dan laut sebagai satu kesatuan. Namun, dalam praktiknya, daerah-daerah kepulauan masih menghadapi masalah ketimpangan pembangunan, kemiskinan, serta keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar. Kebijakan sentralistik belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan wilayah dengan karakter geografis khusus.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah memakai otonomi daerah untuk memberi kewenangan pada daerah. Kewenangan mencakup pengelolaan sumber daya laut sampai batas tertentu. Langkah menandakan pembagian kekuasaan. Kebijakan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan juga bertujuan memperkuat kedaulatan negara. Fokus kedaulatan terletak pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang sangat penting. RUU Daerah Kepulauan hadir sebagai solusi mengatasi ketimpangan. RUU Daerah Kepulauan memberi perhatian khusus berupa pendanaan. RUU Daerah Kepulauan menambah kewenangan. RUU Daerah Kepulauan menyediakan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah kepulauan. Saya rasa kebijakan ini menggabungkan geopolitik dan otonomi daerah, sehingga persatuan wilayah Indonesia menjadi lebih kuat.

Selanjutnya, optimalisasi potensi maritim seperti perikanan, pariwisata laut, dan transportasi laut. Ini menjadi bagian penting dalam rencana geopolitik nasional. Walau potensi maritim besar, kontribusi sektor maritim ke perekonomian nasional masih belum maksimal. Maka pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Wawasan Nusantara bukan hanya berarti persatuan wilayah, tapi juga menjadi dasar kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Jadi peran geopolitik lewat kebijakan otonomi daerah penting. Kebijakan otonomi daerah menjaga kedaulatan. Kebijakan otonomi daerah meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan otonomi daerah memperkuat integrasi nasional Indonesia²⁴.

Di panggung geopolitik dunia, kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia menambah nilai Wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Pada masa pemerintahan Joko

²⁴ Marcellus Hakeng Jayawibawa, "Empowering Archipelago Regional Laws : A Legal Analysis of Their Role in Promoting Equal Development and Enhancing the Well-Being of People in Indonesia," n.d., 1-13.

Widodo, kebijakan Indonesia memperkenalkan konsep poros maritim dunia. Konsep poros maritim dunia menekankan penguatan keamanan laut, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun kekuatan angkatan laut sebagai bagian strategi nasional. Kebijakan Indonesia tidak hanya melayani kepentingan dalam negeri. Kebijakan Indonesia juga terpengaruh dinamika persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat dan China berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah strategis Indo-Pasifik. Indonesia berada di posisi penting. Indonesia menghubungkan jalur perdagangan dunia. Indonesia juga menjaga keseimbangan kekuatan (*balance of power*).

Lebih lanjut, posisi geografis Indonesia berada di jalur maritim internasional. Posisi itu menjadikan Indonesia pusat perhatian negara-negara besar. Jalur strategis seperti Selat Malaka dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi alasan utama. Geopolitik tidak hanya soal lokasi. Geopolitik juga memengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi pembangunan nasional. Karena itu, penguatan otonomi daerah menjadi penting. Daerah-daerah, terutama wilayah pesisir dan kepulauan, harus dapat mengelola potensi lokal. Dengan begitu, daerah-daerah dapat mendukung kepentingan nasional. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah. Daerah tidak hanya objek kebijakan, tapi juga subjek yang bantu memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Di sisi lain, tantangan geopolitik muncul karena konflik kepentingan antarnegara dan ancaman pada keamanan maritim. Nah, contoh konkretnya adalah sengketa batas wilayah serta persaingan menguasai jalur perdagangan laut. Karena itu, kebijakan poros maritim dunia harus dipadukan dengan koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi itu menjaga kedaulatan wilayah dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan utama. Ia memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Jadi, menggabungkan geopolitik global dengan kebijakan otonomi daerah menjadi kunci utama. Ini memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan daya saing Indonesia di panggung internasional²⁵.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dibahas, kami menyimpulkan bahwa geopolitik penting untuk memperkuat Wawasan Nusantara dan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Karena Indonesia terletak di

²⁵ Imranul I Laskar et al., "The Vantage Point of Geopolitics : Capturing Indonesia ' s Maritime Axis The Vantage Point of Geopolitics : Capturing i Ndonesia ' s Maritime Axis," n.d., <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1089/1/012062>.

kepulauan strategis, kita harus mengelola darat dan laut secara terpadu. Wawasan Nusantara menjadi landasan utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman wilayah, suku, budaya, dan kepentingan daerah. Bagi saya, otonomi daerah menjadi alat penting untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengelola potensi lokal secara baik. Jika otonomi daerah dijalankan dengan baik, otonomi daerah dapat memperkuat ketahanan nasional dan mendukung kepentingan geopolitik Indonesia. Namun, otonomi daerah juga menghadapi banyak tantangan. Tantangan itu meliputi ketimpangan pembangunan, konflik kewenangan, dan potensi disintegrasi yang muncul karena ego kedaerahan. Studi kasus RUU Daerah Kepulauan dan kebijakan poros maritim dunia menunjukkan integrasi geopolitik, Wawasan Nusantara, dan otonomi daerah. Integrasi itu menjadi kunci menjaga kedaulatan negara. Kunci itu penting di perbatasan dan kepulauan. Dinamika geopolitik global menuntut Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya. Indonesia juga harus menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Nilai kebangsaan harus diperkuat. Sinergi itu membuat kebijakan otonomi daerah selaras dengan semangat Wawasan Nusantara. Indonesia dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliza, A., Nehe, A. S., Sihotang, A. M., Hakim, B., Purmadana, E., Praswadi, H., Raziq, M., Paulina, M., Darmawan, M. R., Nurdiana, Suhada, R., & Sabina, S. (2022). Geopolitik Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 92–109.
- Asrina, I. A., Ahmad, R. K., & Pendidikan, G. (2024). Geopolitik dan geostrategis Indonesia: Peranan otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24266–24276.
- Fadillah, A. N., Nainggolan, T. E., Siregar, W. S., Pratama Lase, Y. L., & Ivanna, J. (2025). Wawasan Nusantara sebagai pilar geopolitik Indonesia: Strategi integrasi nasional di era dinamika global. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5).
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(3), 2409–2418. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5423>
- Manurung, M., Khudri, S., & Sa, H. (2025). Wawasan Nusantara, geopolitik dan geostrategi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9, 21252–21256.
- Prawesti, D. A., Wulandari, R., Ja, M., & Ika, A. M. (2023). Perspektif, kontribusi, dan

- dukungan mahasiswa dalam Wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(6), 9–17.
- Santoso, G., Prawesti, D. A., Wulandari, R., Sodik, M. J., & Puspita, A. M. I. (2023). Persfektif, kontribusi, dan dukungan mahasiswa dalam Wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), 9–17. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i5.1047>
- Studi, P., Hukum, M., Sarjana, P. P., & Rai, U. N. (2025). The challenge of globalization towards the principles. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(8), 1–16.
- Tamu, A. R. (2025). Wacana kritis Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik bangsa: Tinjauan historis dan urgensinya dalam kebijakan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 672–683. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1492>
- Tamu, A. R., Ekonomi, P., & Tamu, R. (2025). Tinjauan yuridis Wawasan Nusantara sebagai paradigma dalam pembentukan kebijakan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan pelestarian sosial budaya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(3), 672–683. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). Geopolitik Indonesia dalam Dinamika Global.
- Suryadinata, L. (2018). *Indonesia's Foreign Policy and Geopolitics. Journal of Southeast Asian Studies*.
- Asrina, A., dkk. (2024). *Geopolitik Indonesia dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahman, A. (2024). *Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Konteks Persaingan Globalisasi*. ResearchGate Publication.
- Iqthisadi. (2024). *Dampak Otonomi Daerah terhadap Integrasi Nasional dan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar*.
- Suryadinata, L. (2018). *Indonesia's Foreign Polic*
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Huala Adolf. (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Deddy Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kacung Marijan. (2010). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hans Kelsen. (2007). *General Theory of Law and State*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Jean Bodin. (1992). *On Sovereignty*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ryaas Rasyid. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan. (2004). *Hubungan Pusat dan Daerah*. Jakarta: FH UII Press.